

**IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN SOSIAL DAN PELATIHAN
KETERAMPILAN BAGI ANAK PUTUS SEKOLAH**

(Studi di UPT Panti Sosial Bina Remaja Provinsi Kalimantan Tengah)

Sahay, M. F. A., Maharani, Risqi Nur.,

Abstract

The Social Guidance and Skills Training Program for School Dropout Children is a government response in addressing the problem of school dropouts and children with socioeconomic vulnerability. In this program, it is hoped that it can reshape the attitudes and behavior of teenagers who drop out of school in accordance with the values and norms of the community and strive so that they can prepare their future with the skills provided. This study uses descriptive qualitative methods that describe or describe The Social Guidance and Skills Training Program for School Dropout Children. This study uses the theory of policy implementation according to George Charles Edwards III which is influenced by four indicators, namely: Communication, Resources, Disposition or Attitude of Actors, and Bureaucratic Structure. The results of this study indicate that the implementation of the Social Guidance Program and Skills Training for School Dropouts is in the communication indicators of the lack of program socialization prior to selection. Resource indicators are still inadequate and require maintenance in facilities / infrastructure. For indicators of disposition and bureaucratic structure, it has been running optimally. The factors that influence, namely; 1) supporting factors: creative and innovative human resources, and a government budget. 2) inhibiting factors: lack of program socialization, inadequate facilities / infrastructure requiring maintenance, limited departments, and lack of security personnel. Based on these results it can be concluded that this program is still not optimal in terms of communication and resource indicators.

Keywords: Implementation, Guidance, Training.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan hak semua warga negara, namun belum semua warga negara mampu meraih kesejahteraan dalam kehidupannya. Ketidak-mampuan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik yang ada dalam individu maupun faktor dari luar/lingkungan. Kemajuan suatu negara akan banyak ditentukan oleh kemajuan pendidikan dari masyarakatnya. Oleh karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab

bersama antara orang tua/keluarga, masyarakat, dan negara. Pendidikan sangatlah penting dalam kehidupan dan pendidikan pula dianggap sangat bermakna dalam memberdayakan potensi yang dimilikinya.

Pendidikan yang baik dan bermakna adalah pendidikan yang mampu mengantarkan dan memberdayakan potensi anak didik sesuai dengan bakat, kemampuan dan minat yang dimilikinya sehingga menjadi bekal di masa depan. Tapi pada kenyataannya masih banyak

remaja yang putus sekolah. Anak putus sekolah adalah masalah yang sering dihadapi anak-anak kurang mampu.

Indikator	Tahun Ajaran		
	2016/2017	2017/2018	2018/2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Putus sekolah			
SD	0,23	0,13	0,24
SMP	0,40	0,50	0,98
SMA	0,83	0,58	1,41
SMK	1,79	1,44	3,16

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Sosial adalah salah satu instansi pemerintahan yang berwenang untuk menangani permasalahan remaja putus sekolah. Dinas sosial memiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis yang tidak lain tugasnya adalah menjadi tempat pembinaan dari penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pembinaan tersebut dilakukan dengan cara pelatihan keterampilan dan memberikan bimbingan. Kegiatan dalam Program Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi Anak Putus Sekolah di Panti Sosial Bina Remaja Provinsi Kalimantan Tengah yaitu bimbingan sosial, bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan keterampilan (otomotif dan menjahit), bimbingan keterampilan penunjang (*home industry*), PBK (Praktek Belajar Kerja). Selain membimbing, kegiatan selanjutnya mengarahkan, memotivasi dan mengembangkan kewirausahaan, menyalurkan ke dunia usaha sesuai dengan keterampilan yang didapat dan mengembalikan ke dunia pendidikan.

LANDASAN TEORI

1. KEBIJAKAN PUBLIK

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan dari bahasa

Inggris, yaitu *public policy*. Ada yang menerjemahkan kata *policy* menjadi “kebijakan” dan ada juga yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan”. Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”, kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik (Anggara, 2014: 35).

James Anderson dalam Nugroho (2014: 3), mendefinisikan sebagai *a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors is dealing with a problem or matter of concern* (tindakan yang relatif stabil, tindakan yang disengaja diikuti oleh aktor atau serangkaian aktor yang berurusan dengan masalah atau masalah yang menjadi perhatian).

Menurut Nugroho dalam Pasolong (2007: 40), kebijakan publik dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) Kebijakan yang bersifat *makro*, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum seperti yang disebut di atas. 2) Kebijakan yang bersifat *meso*, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelaskan pelaksanaan, seperti Kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Wali Kota. 3) Kebijakan yang bersifat *mikro*, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik seperti Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

2. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster dalam Herabudin (2016:114), *to implement*

(mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Model implementasi yang dipilih oleh peneliti yaitu; model implementasi kebijakan publik menurut George Charles Edwards III dalam Herabudin (2016:127), implementasi dapat diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (output, outcome). Aktivitas implementasi menurutnya terdiri dari atas perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosiasi, dan lain-lain. Didalam model implementasi ini terdapat empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaku, dan struktur birokrasi. Keseluruhan variabel saling berhubungan dan saling memengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi (Anggara, 2014: 250).

3. PROGRAM BIMBINGAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN ANAK PUTUS SEKOLAH

Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 45 tahun 2017 tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah menjelaskan unit pelaksana teknis (UPT) adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. UPT Panti Sosial Bina Remaja mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional

dan/atau bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi anak telantar dan anak putus sekolah agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta melaksanakan pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, yang mempunyai *natural setting* sebagai deskriptif, sumber data langsung, proses lebih dipentingkan, analisis yang dilakukan secara analisa induktif serta makna merupakan hal yang diperlukan. Menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2019:5) dalam menyatakan "*bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.*" Penelitian kualitatif ini berfokus pada interpretasi data yang pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi. Pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan Program Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi Anak Putus Sekolah dan menemukan temuan-temuan praktis yang diterapkan secara langsung dilokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di UPT Panti Sosial Bina Remaja Jl. Rajawali No 10, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Sumber data Merupakan data yang diperoleh dari tempat penelitian untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan

fokus penelitian. Teknik pengumpulan data harus menggunakan prosedur yang sistematis dan terstandar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian (Pasolong, 2016:130). 3 teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, tahapan analisis data menurut Miles dan Hubberman dalam Yusuf (2014:407) meliputi antara lain: 1) reduksi data; 2) penyajian data; dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN

1. KOMUNIKASI

komunikasi yang berjalan di UPT Panti Sosial Bina Remaja pada anak panti sudah bagus. Hanya saja program ini masih terjadi kendala pada saat anak putus sekolah, sebelum seleksi tidak ada sosialisasi program ini mereka hanya tau dari keluarga maupun dari lulusan panti sosial bina remaja.

2. SUMBER DAYA

Sumber daya dalam implementasi program, fasilitas yang diberikan untuk anak panti sudah memenuhi kebutuhan sehari-hari anak selama di panti sosial bina remaja. Hanya saja fasilitasnya/sarana dan prasarana masih kurang memadai karena perawatannya kurang. Dan sumber daya manusia pada tahun 2020 ini berkurang untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) karena ada yang pensiun dan ada yang di pindahkan.

3. DISPOSISI

Disposisi dengan adanya program bimbingan sosial dan keterampilan ini sangat diterima karena program ini sangat

bermanfaat untuk membentuk karakter anak dan bisa membuka usaha sendiri.

4. STRUKTUR BIROKRASI

Para implemendor telah mempunyai Standard Operating Procedures (SOP) dan Juklak (petunjuk pelaksanaan) serta Juknis (petunjuk teknis).

PEMBAHASAAN

1. Implementasi Program Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Bagi Anak Putus Sekolah

Pelaksanaan program bimbingan sosial dan keterampilan bagi anak putus sekolah ini masih belum optimal calon anak panti masih belum mengetahui informasi dari program secara langsung dan mengetahui dari alumni panti sosial bina remaja ataupun keluarga yang mempunyai kenalan di panti sosial bina remaja serta pada penyeleksian. Sasaran dari program bimbingan sosial dan keterampilan ini adalah untuk anak putus sekolah dan anak rawan sosial ekonomi, fakta dilapangan pun tepat sasaran. Sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, fasilitas yang ada memerlukan pemerliharan atau pembaharuan sarana dan prasarana. Tetapi pihak UPT Panti Sosial Bina Remaja tidak bisa untuk melakukannya karena terkendala pada anggaran yang tidak ada untuk pemerliharan sarana dan prasarana. Disposisi dan Struktur Birokrasi sudah optimal dalam pelaksanaan program ini, mempunyai disposisi menerima dan mendukung program ini dengan baik serta mempunyai komitmen untuk mencapai tujuan membentuk karakter anak. Dan struktur organisasinya sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2017 (Pembentukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah), untuk tugas dan fungsi yang di laksanakan sesuai dengan Pergub No. 45 Th 2017. Dan semua program sudah dilaksanakan sesuai dengan Juklak (petunjuk pelaksanaan) dan Juknis (petunjuk teknis) para pelaksana pelayanan semua sesuai SOP (*Standard Operating Procedures*).

2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Bagi Anak Putus Sekolah

Faktor pendukung adalah adanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang kreatif dalam memberikan bimbingan sosial, fisik, mental dan keterampilan itu dapat membuat implementasi program ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dan sumber daya manusia yang ada di UPT Panti Sosial Bina Remaja ini telah memahami tugas fungsinya sendiri. Selain itu, Agar program bimbingan sosial dan keterampilan ini berjalan dengan baik, maka sebagai faktor pendukungnya yaitu anggaran pemerintah berasal dari APBD sudah diberikan oleh pemerintah setempat untuk memenuhi kebutuhan anak panti, mulai dari keperluan sandang pangan seperti makanan sehari-hari yang diberikan, keperluan anak panti serta kebutuhan lainnya seperti kebutuhan kelengkapan pakaian. Sedangkan, faktor penghambat yang menjadi kendala implementasi program bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan di UPT Panti Sosial Bina Remaja adalah 1) kurangnya sosialisasi program bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan sebelum penyeleksian, karena tidak ada anggaran khusus untuk melakukan

sosialisasi tersebut. 2) Sarana dan prasarana yang ada di UPT Panti Sosial Bina Remaja masih kurang memadai dan memerlukan pemeliharaan. Karena masih sedikitnya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk memberikan layanan psikososial terhadap klien. 3) Keterbatasan jurusan, karena hanya ada otomotif dan menjahit. Dan 4) Kurangnya tenaga keamanan.

KESIMPULAN

Dengan adanya program ini dapat membuat anak putus sekolah mempunyai karakter dan keterampilan untuk dirinya dalam dunia kerja maupun bermasyarakat. Adapun implemementasi program bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi anak putus sekolah di UPT Panti Sosial Bina Remaja ini, indikator pertama komunikasi belum optimal karena calon anak panti masih belum mengetahui informasi dari program secara langsung dan mengetahui dari alumni panti sosial bina remaja ataupun keluarga yang mempunyai kenalan di panti sosial bina remaja serta pada penyeleksian. Indikator kedua sumber daya dalam program ini sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, dan untuk sarana/prasarana masih kurang memadai atau memerlukan pemeliharaan tetapi terkendala dalam anggaran. Indikator ketiga disposisi menerima dan mendukung program ini dengan baik serta mempunyai komitmen untuk mencapai tujuan membentuk karakter anak. Indikator terakhir struktur birokrasi dengan berjalannya program ini sudah dilaksanakan sesuai dengan Juklak (petunjuk pelaksanaan) dan Juknis (petunjuk teknis) serta pelaksana pelayanan semua sesuai SOP (*standard operating procedures*). Begitu pula dengan tugas, fungsi serta struktur

birokrasi terdapat dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknisi pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Faktor-faktor yang mempengaruhi Impelementasi program bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi anak putus sekolah di UPT Panti Sosial Bina Remaja yaitu; 1) faktor pendukung: sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang kreatif serta inovatif dalam memberikan bimbingan dan anggaran pemerintah berasal dari APBD sudah diberikan oleh pemerintah setempat. 2) faktor penghambat: kurangnya sosialisasi program bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan sebelum penyeleksian karena tidak ada mempunyai anggaran khusus melakukan sosialisasi. Sarana dan prasarana yang masih kurang dan memerlukan pemeliharaan, keterbatasan jurusan, dan kurangnya tenaga keamanan. Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan pelaksanaan program bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi anak putus sekolah, yaitu; 1) agar tidak menjadi masalah, sebaiknya memberikan sosialisasi program ini sebelum klien seleksi. Atau lebih baik meningkatkan pemberian informasi program ini melalui media sosial seperti brosur, spanduk, dll. 2) Terkait dengan sarana prasarana lebih ditingkatkan lagi agar memadai untuk keberlangsungan program bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan ini. Ditambah lagi untuk jurusan yang ada di panti sosial bina remaja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (2020). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah 2019*. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2020). *Statistik Kependudukan Kalimantan Tengah 2019*. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
- Dewi, R. K. (2016). *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2014). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sarwono, S. W. (2010). *Psikologi Remaja edisi revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2013). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- (2015). *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis*

Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta.

Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Jakarta: FISIP UPDM.

Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Dokumen-dokumen:

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 106 / HUK / 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Internet:

Yusuf. (2019). *Bonus demografi, digital talent scholarship, hingga palapa ring*. Retrieved November 7, 2019, from <https://www.kominfo.go.id/content/detail/16370/dari-bonus-demografi-digital-talent-scholarship-hingga-palapa-ring/0/artikel>

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Statistik Pendidikan*. Retrieved November 7, 2019, from <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/>